

Nama : Haswita
Tempat Tanggal Lahir : Danau sati, 01 Januari 1977
Agama : Islam
Alamat : Negeri Danau Sati. RT. 002. RW. 004 Desa
Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo
Nomor HP : 081271662800
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Abdul Kadir
Nama Ibu : Sawiyah
Riwayat Pendidikan : Lulus SD Tahun 1990
Lulus SMP Tahun 1994
Lulus SMA Tahun 1997
Lulus D3 Tahun 2001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggajian merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu organisasi atau perusahaan. Penggajian ini sering dijadikan motivasi utama dalam memperbaiki dan menilai kinerja seorang pekerja baik itu di perusahaan maupun dinas (instansi). Terkadang orang menganggap bahwa gaji yang besar akan mampu meningkatkan kinerja seorang pekerja.

Pemberian gaji pada suatu organisasi baik perusahaan atau dinas haruslah diperhatikan dengan baik dan serius dikarenakan gaji ini merupakan masalah yang sangat sensitif dan mudah menimbulkan konflik atau perselisihan jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Penggajian akan memuaskan semua pihak apabila mengikuti aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan serta mengikuti sistem penggajian yang efektif.

Salah satu sistem informasi akuntansi yang ada pada suatu organisasi (perusahaan dan dinas) adalah sistem penggajian. Sistem penggajian karyawan di perusahaan maupun sistem penggajian pegawai di dinas merupakan hal penting dan utama untuk dilaksanakan dengan baik. Secara umum, sistem penggajian ini bertujuan untuk mengatur penggajian sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dalam suatu organisasi.

Sistem penggajian yang baik dan efektif adalah sistem penggajian yang lengkap meliputi beberapa unsur atau bagian yang terlibat didalamnya sehingga penggajian dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, dan terkendali. Jika tidak lengkap sistem penggajian yang dimiliki oleh suatu organisasi baik itu perusahaan

maupun dinas maka akan terjadi berbagai permasalahan dalam proses penggajian yang dijalankan.

Beberapa unsur yang semestinya terlibat dalam sistem penggajian secara umum adalah adanya pihak yang berwenang untuk mengotorisasi atau menyetujui penggajian, pihak yang melakukan pembayaran gaji, adanya pencatatan atas penggajian yang dibayar, adanya dokumen resmi penggajian, dan unsur-unsur lainnya sehingga sistem penggajian menjadi tertib dan lancar.

Kabupaten Rokan Hulu berdiri secara resmi pada tahun 1999 dimana Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu memiliki banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu SKPD tersebut adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tugas pokoknya adalah mengurus masalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ada di wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh sekretaris. Sesuai dengan struktur organisasi maka pada bagian sekretaris ini terdapat tiga bagian yaitu Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, serta Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian yang mengurus penggajian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu adalah Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Peraturan penggajian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu maka penulis menemukan masalah terkait dengan sistem penggajian yang dilaksanakan. Masalah tersebut terkait dengan pihak yang melakukan pembayaran gaji di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam ketentuan penggajian yang berlaku dinyatakan bahwa untuk penggajian pegawai negeri sipil maka yang melakukan pembayaran gaji adalah bendahara pembantu gaji akan tetapi dalam kenyataannya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang melakukan pembayaran gaji dirangkap oleh bendahara pengeluaran, ini artinya terjadi rangkap jabatan sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggajian pegawai negeri sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul: “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis membuat rumusan masalah: Bagaimanakah sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil yang diterapkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian biasanya terkait dengan rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil yang diterapkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada dinas atau instansi.
2. Bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem penggajian.
3. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi tambahan untuk penelitian sejenis.
4. Bagi Program Studi Akuntansi, dapat lebih memperkaya khasanah penelitian bidang sistem informasi akuntansi.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Penelitian yang baik adalah penelitian yang fokus ke satu topik utama. Untuk lebih fokus maka penelitian ini hanya meneliti tentang sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil yang diterapkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Elieta Liestiani Suganda (2014) dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan melibatkan fungsi-fungsi penting yaitu Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan dan masih dilakukan secara manual. Selain itu, sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan sistem pengendalian intern karena masih terdapat kelemahan yaitu belum terdapat pemisahan fungsi kepegawaian dengan fungsi pencatatan waktu dan belum terdapat fungsi akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab yaitu:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan kajian pustaka yang berisikan teori atau konsep yang mendukung topik penelitian yang dilakukan.
- Bab III : Merupakan metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

Bab IV : Merupakan hasil dan pembahasan yang membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi

Menurut Pendapat Mulyadi (2008), setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh James A. Hall (2009), sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.

Pendapat dari Mulyadi (2008) menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

Menurut pendapat James A. Hall (2009), sistem informasi akuntansi terdiri atas tiga subsistem sebagai berikut:

1. Sistem pemrosesan transaksi (*transaction processing system*).
2. Sistem buku besar/pelaporan keuangan (*general ledger/financial reporting system*).

3. Sistem pelaporan manajemen (*management reporting system*).

Menurut Sadeli (2010) sistem akuntansi merupakan bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Seorang akuntan sistem harus merencanakan suatu sistem yang memiliki unsur pemeriksaan dan mencocokkan untuk dapat menjaga harta perusahaan dan mempunyai arus informasi yang efisien dan bermanfaat bagi manajemen.

2.1.2 Definisi Akuntansi

Beberapa definisi akuntansi dari pendapat para ahli dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Niswonger dkk (2009), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.
2. Menurut Rudianto (2012), akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.
3. Menurut Rahman Pura (2012), akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam menyediakan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.
4. Menurut pendapat Ismail (2012), akuntansi adalah seni dalam mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait

dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang.

5. Menurut Suwardjono (2007), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.
6. Menurut Widiati Winwin dan Ilham Wahyudi (2006), akuntansi adalah suatu informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah

diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah.
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).

3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang di bidang keuangan negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Gaji merupakan bagian dari kompensasi paling besar yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan dan instansi) sebagai balas jasa kepada tenaga kerja

yang telah bekerja dan diberikan secara periodik. Gaji merupakan hak tenaga kerja yang diatur dengan Undang-Undang dan juga bisa menjadi salah satu motivasi dalam bekerja.

Sistem akuntansi penggajian antara perusahaan dengan instansi berbeda dimana sistem akuntansi penggajian perusahaan diatur dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan sedangkan sistem akuntansi penggajian instansi pemerintah diatur dengan Undang-Undang.

Sistem akuntansi penggajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Beberapa hal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015 yaitu:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (Kepala SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015 menyatakan bahwa ruang lingkup tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara serta penyampaiannya meliputi: Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, Bendahara Pengeluaran PPKD serta Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas maka Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD. Pasal 5 ayat 4 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu wewenang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.

Lampiran III Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015 menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja dimana salah satu dokumen SPP adalah dokumen LS (Langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan, selain dokumen LS untuk pengadaan barang dan jasa serta dokumen LS bendahara/LS lainnya.

SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

1. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
2. SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa.

SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang diajukan disertai dengan lampiran sebagai berikut:

1. Salinan SPD.
2. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran.
3. Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran gaji induk
 - b. Gaji susulan
 - c. Kekurangan gaji
 - d. Gaji terusan
 - e. Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji.
 - f. SK CPNS
 - g. SK PNS
 - h. SK kenaikan gaji
 - i. SK jabatan
 - j. Kenaikan gaji berkala
 - k. Surat pernyataan pelantikan
 - l. Surat pernyataan masih menduduki jabatan

- m. Surat pernyataan melaksanakan tugas
 - n. Daftar keluarga (KP4)
 - o. Fotocopi surat nikah
 - p. Fotocopi akte kelahiran
 - q. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji
 - r. Daftar potongan sewa rumah dinas
 - s. Surat keterangan masih sekolah/kuliah
 - t. Surat pindah
 - u. Surat kematian
 - v. SSP PPh pasal 21
 - w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
4. Lampiran lain yang diperlukan.

Pembukuan belanja oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan beberapa buku sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
 - a. Buku Pembantu Kas Tunai
 - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank
 - c. Buku Pembantu Panjar
 - d. Buku Pembantu Pajak
 - e. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan sebagai berikut:

1. SP2D TU/LS
2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “Belanja Gaji dan Tunjangan” di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran.
2. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan

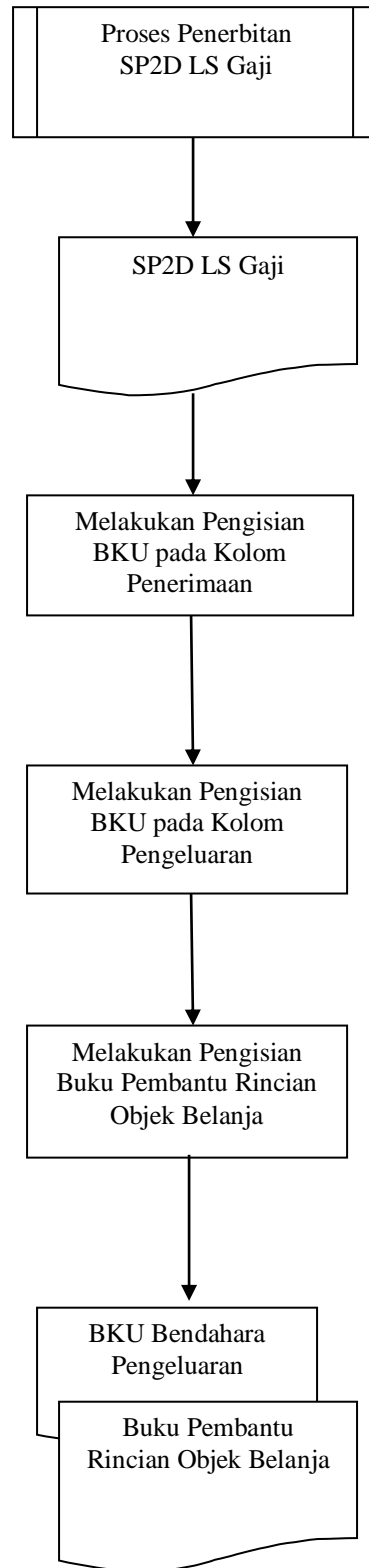
Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

2. Pertanggungjawaban fungsional

Pertanggungjawaban fungsional berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan Buku Kas Umum dan Laporan Penutupan Kas.

Berikut ini adalah *flowchart* penatausahaan belanja SP2D LS gaji sesuai dengan lampiran III Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2015:

Gambar 2.1
Flowchart Penatausahaan Belanja SP2D LS Gaji



Sesuai dengan gambar 2.1 *flowchart* Penatausahaan Belanja SP2D LS Gaji maka dapat dijelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran menerima SP2D LS gaji untuk belanja yang dilakukan.
2. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses pengisian BKU pada kolom penerimaan.
3. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses pengisian BKU pada kolom pengeluaran. Tanggal dan jumlah yang dicatat sama dengan tanggal dan jumlah yang dicatat di kolom penerimaan.
4. Bendahara pengeluaran melakukan proses pengisian buku pembantu rincian objek belanja.
5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang sudah *ter-update*.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terkait dengan sistem informasi akuntansi yang telah dilakukan peneliti lain sebagai berikut:

1. Elieta Liestiani Suganda (2014) dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan dan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern. Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu

dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara benar dan lengkap untuk pemecahan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan melibatkan fungsi-fungsi penting yaitu Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan dan masih dilakukan secara manual. Selain itu, sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan sistem pengendalian intern karena masih terdapat kelemahan yaitu belum terdapat pemisahan fungsi kepegawaian dengan fungsi pencatatan waktu dan belum terdapat fungsi akuntansi.

2. Faizal Firdaus (2012) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan untuk menganalisis tingkat efektifitas sistem informasi akuntansi penggajian yang ditetapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat terdiri dari prosedur-prosedur yang membentuk sistem penggajian, dokumen dan pencatatan akuntansi yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait dan telah memiliki pengendalian internal

dalam proses monitoring sistem akuntansi penggajiannya. Pengukuran tingkat efektifitas sistem informasi akuntansi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan melihat ada atau tidaknya unsur-unsur dan tujuan dari sistem informasi akuntansi. Berdasarkan klasifikasi rumus Champion, nilai 85,78% menunjukkan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dinyatakan efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Komplek Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Desa Pematang Berangan dimana objek yang diteliti adalah sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data pada saat penelitian ini dilakukan selama kurun waktu tertentu. Penggambaran objek dilakukan sesuai dengan fakta sebenarnya yang terjadi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013), data penelitian terbagi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif di mana data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan angka sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka tapi berbentuk narasi atau deskripsi tentang prosedur yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil.

Data kualitatif yang terkait dengan penggajian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu bersumber dari Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur tentang sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.
2. Teknik dokumentasi yaitu meminta data-data non keuangan yang telah tersedia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu berupa prosedur penggajian pegawai negeri sipil dan aturan yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis dan membahas data yang telah diperoleh secara seksama sesuai dengan karakteristik variabel yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari analisis dan pembahasan tersebut akan menghasilkan beberapa kesimpulan tentang penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.